



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUWARDI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA**
3. NHK : **900788**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.586.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/188 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 610.000.000
3. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. Tanah Seluas 3.028 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 1.818 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 92.000.000
6. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
7. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 156.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF. 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.



122.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 27.850.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 23.242.124

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.793.092.124

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.793.092.124

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.